ANALISIS GENDER DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT DI KECAMATAN MALIFUT KABUPATEN HALMAHERA UTARA (THE ROLE OF GENDER IN COMMUNITY FOREST MANAGEMENT ACTIVITIES, MALIFUT DISTRICT, NORTH HALMAHERA REGENCY)

Oleh
Ibnu Fajar Togubu[1)], Aqshan Shadikin Nurdin[2)], Asiah Salatalohy[3)]
[1,2,3] Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Khairun
Email: [3]salatalohy6@gmail.com

Abstrak

Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals)* yang disepakati 190 negara. *Sustainable Development Goals* juga bertujuan untuk pembangunan lain yaitu ekonomi berkelanjutan dan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati. Laki laki dan perempuan melakukan peran gender yang berbeda pada pengelolaan hutan rakyat, pengelolaan hutan yang melibatkan laki-laki dan perempuan diharapkan dapat memberikan manfaat sangat besar dalam kebijakan pengelolaan hutan (Argawal, B 2009). Pengelolaan Hutan Rakyat di Kecamatan Malifut dilakukan oleh suami dan istri namun belum diketahui apa saja peran-peran yang dijalankan dalam pengelolaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran suami dan istri dalam pengambilan keputusan dan curahan waktu kerja pada kegiatan pengelolaan hutan rakyat di Desa Sabaleh Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara. Objek penelitian ini adalah anggota kelompok tani Mairake Desa Sabaleh dengan jumlah 25 rumah tangga. Setiap rumah tangga terdiri dari suami dan istri, sehingga jumlah seluruh responden terdiri dari 48 responden. Berdasarkan hasil penelitian, pengambilan keputusan pada kegiatan penanaman dalam program hutan rakyat oleh suami sebesar 53,78%, istri 46,22% dan perencanaan penanaman dalam program hr oleh suami sebesar 54,86%, istri 45,14%. Curahan waktu kerja pada kegiatan penanaman oleh suami sebesar 52,01%, istri 47,99% serta curahan waktu kerja perencanaan suami 54,32%, istri 45,68%.

Kata Kunci: Gender, Hutan Rakyat, Malifut

PENDAHULUAN

Konsep pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat adalah merupakan strategi kehutanan sosial yang bertujuan hutan untuk kemakmuran masyarakat. Di dalam pengelolaan hutan dengan strategi kehutanan sosial, disesuaikan dengan karakteristik lahan tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk hutan adat dan batas administrasi pemerintahan, yang berbeda dengan sistem konvensional (timber management), yang mempunyai perbedaan.

Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang disepakati 190 negara, dengan 17 goals yaitu ekonomi, sosial dan keanekaragaman hayati, Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan semua negara. SDGs juga bertujuan untuk pembangunan lain yaitu ekononomi berkelanjutan dan lingkuhan hidup serta keanekaragaman hayati. Bagi Indonesia kesetaraan gender sudah cukup maju dan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia (Bappenas 2009). Adapun peran pemerintah dalam pengelolaan hutan rakyat yaitu sebagai penyedia jasa pada petani, dalam bentuk pembinaan dan penyediaan sarana dan prasarana. Jasa-jasa yang diharapkan dari pemerintah guna memperlancar proses

pengelolaan hutan rakyat adalah jasa perencanaan, teknis budidaya, kegiatan penyuluhan.

Hutan rakyat yang dikelola di Desa Sabaleh Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara adalah hutan yang tumbuh di atas tanah milik masyarakat lokal yang dapat di katagorikan hutan rakyat. Berdasarkan hasil wawancara total luas hutan rakyat yang dimiliki responden dengan jumlah 25 KK yaitu 30 hektar. Hutan rakyat ini dikelola oleh laki-laki dan perempuan. Pengelolaan hutan rakyat di harapkan dapat menambah pendapatan petani.

Laki laki dan perempuan melakukan peran gender yang berbeda pada pengelolaan hutan rakyat, pengelolaan hutan yang melibatkan laki-laki dan perempuan diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam kebijakan pengelolaan hutan (Argawal, B 2009). Namun belum diketahui apa saja peran laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan hutan rakyat di Desa Sabaleh serta berapa besar persentase peran gender dalam pengambilan keputusan pada pengelolaan hutan rakyat di Desa Sabaleh Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apa saja peran gender dan persentase pengambilan keputusan dalam pengelolaan rakyat.

LANDASAN TEORI

1. Peran Gender

Peran gender berkaitan dengan peran yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Namun demikian masih banyak pembatasan adat dan norma masyarakat pada perilaku baik laki-laki maupun perempuan, yang diawali dari pelabelan atau stereotipe atau sub-ordinasi (penomorduaan), misalnya: a) Peran yang pantas dilakukan oleh perempuan adalah sektor domestik; peran yang pantas dilakukan oleh laki-laki adalah sebagai pemimpin dan pelindung keluarga, jadi laki-laki bertanggung jawab dan berperan di sektor publik. b) Stereotipe berdasarkan adat diidentikkan dengan peran sebagai berikut:

1) Peran perempuan dalam kegiatan domestik (masak, dandan, memuaskan kebutuhan seksual suami)
2) Posisi perempuan sebagai orang belakang dan nomor dua dalam pengambilan keputusan dalam keluarga.
3) Peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan tulang punggung keluarga.
4) Laki-laki tabu melakukan pekerjaan domestik (cuci piring, cuci baju, dan memasak) karena itu ”pekerjaan perempuan”. Laki-laki melakukan pekerjaan perempuan dikhawatirkan dapat menurunkan derajat dan kewibawaan sebagai pemimpin keluarga.

Kondisi pembatasan norma masyarakat semacam itu menempatkan perempuan pada posisi yang lemah dan terperangkap, karena seharusnya ia dapat pergi untuk meningkatkan kualitas SDM-nya untuk kemudian dapat menempati posisi penting sebagai pemimpin masyarakat di kemudian hari (Sundawati et al.2008).

2. Pengambilan Keputusan

Keputusan adalah kesimpulan dari suatu proses untuk memilih tindakan terbaik dari sejumlah alternatif yang ada. Pengambilan keputusan adalah proses yang mencakup semua pemikiran dan kegiatan yang diperlukan guna membuktikan dan memperlihatkan pilihan yang terbaik. Oleh karena itu teori keputusan juga merupakan suatu teknik analisis yang berkenaan dengan pengambilan keputusan melalui bermacam-macam model (Manik 2003). Seseorang yang melakukan pengambilan keputusan, pada dasarnya dia telah melakukan pemilihan terhadap alternatif-alternatif yang tersedia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan atau pilihan yang tersedia bagi tindakan pengambilan keputusan itu akan dibatasi oleh kondisi dan kapasitas individu yang bersangkutan dan

ISSN 2722-9475 (Cetak)
ISSN 2722-9467 (Online)

faktor eksternal misalnya lingkungan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan fisik, dan sebagainya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan menurut Depdiknas (2007), yaitu:

1. Posisi/kedudukan
2. Masalah atau problem adalah apa yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan yang merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan, direncanakan atau dikehendaki, dan harus diselesaikan. Masalah tidak selalu dapat dikenali dengan segera, ada yang memerlukan analisis, ada pula yang bahkan memerlukan riset sendiri.
3. Situasi adalah keseluruhan faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta apa yang hendak kita perbuat.
4. Kondisi adalah keseluruhan faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat atau kemampuan kita. Sebagian besar faktor tersebut merupakan sumber daya-sumber daya.
5. Tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan unit (kesatuan), tujuan organisasi, maupun tujuan usaha, pada umumnya telah ditentukan.

Pada pengambilan keputusan, terdapat bermacam-macam dasar yang digunakan. Terry (1977) *dalam* Depdiknas (2007) menjelaskan dasar-dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Intuisi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat yang subyektif sehingga mudah terkena pengaruh.
2. Pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena dengan pengalaman seseorang maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung-ruginya dan baik-buruknya keputusan yang akan dihasilkan.
3. Fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada.
4. Wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, atau oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan.
5. Rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada hutan rakyat di Desa Sabaleh, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Selatan selama kurang lebih 3 bulan termasuk persiapan, pengambilan data dan penyusunan laporan.

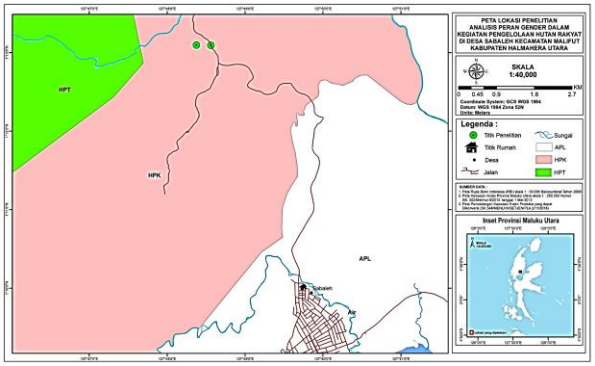

Gambar 1. Peta Lokasi penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian antara lain: kuisioner, alat tulis menulis, dan kamera. Objek penelitian adalah rumah tangga

petani hutan rakyat di Desa Sabaleh, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Teknik Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung obyek di lapangan
b. Studi pustaka dengan mengambil sumber-sumber informasi dari data-data yang telah ada, mempelajari, mengutip buku, jurnal dan laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.
c. Teknik komunikasi langsung yaitu mewawancarai responden dengan menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengambilan responden dilakukan dengan cara sensus, yaitu responden yang diambil merupakan populasi penelitian. Populasi penelitian yaitu semua anggota kelompok tani mairake di Desa Sabaleh dengan jumlah total 25 rumah tangga. Setiap rumah tangga terdiri dari suami dan istri, sehingga jumlah seluruh responden terdiri dari 48 responden. Responden dikelompokan sesuai dengan strata kepemilikan lahan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Strata kepemilikan lahan hutan rakyat

Luas Lahan Hutan Rakyat	Responden	
	N	%
0,25-0,5	3	12
0,6-1,0	9	36
>1,0	13	52
Total	25	100

Metode Pengukuran Variabel

Peran Perempuan dan Laki-laki dalam Pengelolaan Hutan Rakyat

Peran perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan hutan rakyat dapat diketahui dengan melihat curahan waktu kerja. Curahan waktu kerja yaitu jumlah waktu yang digunakan oleh perempuan maupun laki-laki dalam melakukan kegiatan tertentu seperti mencari nafkah, pekerjaan rumah tangga atau kegiatan kemasyarakatan. Terdapat Satu jenis kegiatan untuk menentukan curahan waktu kerja dalam pengelolaan hutan rakyat, yaitu Kegiatan produktif dimana Kegiatan produktif merupakan kegiatan dalam pengelolaan hutan rakyat yaitu seperti kegiatan penyiapan lahan, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pemasaran dalam tanaman penghasil kayu, tanaman penghasil buah, tanaman pangan dan palawija.

Satuan curahan waktu kerja dihitung berdasarkan Hari Orang Kerja (HOK), dalam 1 HOK terhitung 8 jam / hari. Curahan kerja seseorang per hari dapat dihitung dengan cara membagi antara banyaknya waktu kerja yang dihabiskan untuk melakukan kegiatan tertentu dalam satu hari dengan 1 HOK (8 jam/hari).

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan ini sangat relevan dalam sebuah organisasi karena keputusan menyangkut masalah pencapaian tujuan baik secara taktis maupun strategis. Akses atau jangkauan seseorang terhadap sumberdaya diukur dari kepemilikan atas sumberdaya dan kemampuan mereka untuk memperoleh atau melakukan sesuatu kegiatan. Kontrol terhadap sumberdaya diukur dari frekuensi pengambilan keputusan, serta tanggungjawab yang dilakukan oleh anggota rumahtangga, dimana berhubungan dengan kegiatan produktif, reproduktif maupun sosial kemasyarakatan (Basuki,2015).

Iqbal, 2004 mengatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti (digunakan) sebagai suatu cara pemecahan masalah.Teori pengambilan keputusan adalah teori-teori atau teknik-teknik atau pendekatan yang digunakan dalam suatu proses pemilihan alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti (digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah).

Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis secara deskriptif, yang meliputi peran

ISSN 2722-9475 (Cetak)
ISSN 2722-9467 (Online)

perempuan dan laki-laki dan pengambilan keputusan.

1.Peran laki-laki dan perempuan.

Peran laki-laki dan perempuan dalam alokasi waktu pada kegiatan pengelolaan hutan rakyat, dengan melihat waktu yang digunakan oleh perempuan maupun laki-laki dalam melakukan kegiatan tertentu dalam pengelolaan hutan rakyat, dengan menggunakan rentang kriteria persentase penilaian sebagai berikut:

Persentase waktu yang digunakan laki-laki pada pengelolaan hutan rakyat

$$\%Q1 = \frac{\sum Q1}{\sum Q1p} x100\% \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(1)$$

$$\%Qp = \frac{\sum Qp}{\sum Q1p} x100\% \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots..(2)$$

Keterangan :

%Q1 :Presentase waktu yang digunakan laki-laki (jam/tahun)

∑ Q1 :Jumlah waktu yang digunakan laki-laki (jam/tahun)

∑ Q1p :Jumlah waktu total digunakan laki-laki dan perempuan (jam/tahun)

%Qp :Presentase waktu yang digunakan perempuan (jam/tahun)

∑ Qp :Jumlah waktu yang digunakan perempuan (jam/tahun)

∑ Q1p :Jumlah waktu total digunakan laki-laki dan perempuan

(Diniyati dan achmad, 2014)

Peran laki-laki dan perempuan dalam membuat keputusan pada kegiatan pengelolaan hutan rakyat seperti pengambilan keputusan dalam kegiatan perencanaan, penanaman, dan pemanenan hutan rakyat. Asumsi yang sama untuk mengetahui persentase pengambilan keputusan laki-laki dan perempuan juga menggunakan konsep dasar seperti di atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

1. Umur, Kepemilikan lahan, Mata pencaharian dan Pendidikan

Responden yang diwawancarai adalah kelompok tani hutan Desa Sabaleh sebanyak yang terdiri dari suami 25 orang dan istri 23 orang total keseluruan dengan jumlah 48 orang terdiri atas kepala keluarga anggota kelompok tani hutan beserta istri.

Tabel 2. Responden berdasarkan Karaktaristik Umur di desa Penelitian

Kelompok Umur (tahun)	Responden			
	Suami		Istri	
	N	%	N	%
20-30	2	8	3	13,04
31-40	6	24	4	17,39
41-50	10	40	11	47,83
51-60	5	20	4	17,39
>60	2	8	1	4,35
Total	25	100	23	100

Keterangan : N= Jumlah responden, % = Persentase

2. Kepemilikan Luas Lahan

Status kepemilikan lahan di Desa Sabaleh yaitu lahan milik. Lahan milik merupakan lahan milik responden (pribadi) yang diolah sendiri. Lahan hutan rakyat di Desa Sabaleh ditanami tanaman kehutanan dan tanaman pertanian atau disebut agroforestri. Luas total hutan rakyat di Desa Sabaleh yaitu 30 hektar. Luas lahan yang paling banyak dimiliki oleh kelompok tani yaitu dengal luas >1,0 ha dengan jumlah 13 responden sedangkan luas lahan yang <0,5 ha dengan jumlah 3 responden.

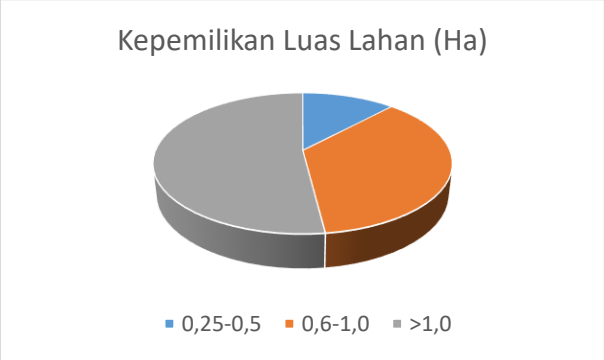

Gambar 1. Kepemilikan Luas lahan

3. Mata Pencaharian

Berdasarkan mata pencaharian utamanya responden di desa penelitian bermata pencaharian sebagai petani dan mata

pencaharian sampingan sebagai peternak, utamanya yang di desa ujung batu. Responden laki-laki 90,77% bermata pencaharian sebagai petani, 90,32% bermata pencaharian sampingan sebagai peternak, sisanya 6,15% sebagai pedagang, 3,08% sebagai karyawan swasta. Responden perempuan 16,92% bermata pencaharian utama sebagai petani, 72,31% sebagai ibu rumah tangga, 1,54% sebagai PNS, 1,54% sebagai honorer dan 7,69% sebagai pedagang. Responden perempuan juga bermata pencaharian sampingan sebagai peternak. Responden berdasarkan mata pencaharian di desa penelitian dapat dilihat pada Tabel 3:

Tabel.3. Karakteristik responden berdasarkan mata pencaharian

Mata Pencaharian	Responden							
	Suami				Istri			
	Utama		Sampingan		Utama		Sampingan	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Petani	16	64,00	9	100,00	3	13,04	22	100,00
Swasta	3	12,00	0	0	1	4,35	0	0
PNS	5	20,00	0	0	4	17,39	0	0
Pedagang	0	0	0	0	2	8,70	0	0
Tukang Batu	1	4,00	0	0	0	0	0	0
IRT	0	0	0	0	13	56,52	0	0
Total	25	100	9	100,00	23	100	22	100,00

Keterangan: N= Jumlah responden
% = Persentase

4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden bervariasi dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Responden laki-laki yang paling banyak berpendidikan pada tingkat SMA yaitu sebanyak 10 (40%) sedangkan responden perempuan yang paling banyak berpendidikan pada tingkat SMA yaitu sebanyak 11 (47,83%).

Pengelolaan Hutan Rakyat di Desa Sabaleh

Pengelolaan hutan rakyat di Desa Sabaleh yang di lakukan oleh kelompok tani yaitu sebagai berikut :

1. Persiapan Lahan

Persiapan lahan adalah kegiatan yang paling utama untuk bisa melakukan penanaman, kegiatan ini merupakan kegiatan pembersihan lahan yang dilakukan secara manual, biasanya dalam kegiatan ini dilakukan sendiri oleh masing-masing pemilik lahan dengan alat yang digunakan sangat sederhana seperti cangkul, parang (Amir, 2020). Setelah kegiatan ini sudah selesai, maka sudah bisa digunakan untuk kegiat an selanjutnya yaitu penanaman.

2. Pembibitan

Pembibitan yang dilakukan oleh kelompok tani mairake yakni dengan cara membuat bibit sendiri, ada juga bibit yang dibeli dan ada juga bantuan bibit dari dinas penyuluh pertanian. Sebelum di adakan penanaman maka harus dilakukan pemilihan bibit-bibit tanaman unggul dan berkualitas serta siap untuk ditanam.

3. Penanaman

Penanaman adalah kegiatan pemindahan bibit dari polibag ke lahan ke lahan tanam. Kegiatan ini di awali dengan proses pemilihan bibit, menentukan jarak tanam, pembuatan lubang tanaman dan dan yang terakhir dilakukan penanaman (Tamrin, 2016).

4. Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan kegiatan yang dilakukan petani pengelola hutan rakyat untuk memelihara tanaman miliknya hingga tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal (Simon, 2004). Kegiatan ini terdiri dari kegiatan penyulaman, penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit.

5. Pemanenan

Pemanenan yang di lakukan oleh kelompok tani mairake di desa sabaleh dengan cara manual. Menurut (Pratama, 2015) Pemanenan merupakan kegiatan yang pemilik lahan lakukan untuk mengambil hasil dari tanaman yang mereka tanam baik berupa daun, dan buah.

ISSN 2722-9475 (Cetak)
ISSN 2722-9467 (Online)

6. Pemasaran

Pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemilik hutan rakyat untuk menjual hasil penennya ke pembeli untuk mendapatkan uang sehingga mampu memenuhi kehidupan keluarga (Mulyana dan Asmarahman, 2010). Biasanya kelompok tani mairake akan menjual hasil panennya jika itu lebih karena sebagian hasil panen akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Peran Laki-laki dan Perempuan dalam Kegiatan Produktif

Peran perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan hutan rakyat yaitu kegiatan produktif. Kegiatan produktif yaitu kegiatan dalam pengelolaan hutan rakyat. Pola tanam hutan rakyat yang diterapakan oleh petani di Desa Sabaleh yaitu pola agroforestri. Menurut (Sunardi, 2010) Peran perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan hutan rakyat dapat diketahui dari dua kegiatan, yaitu kegiatan produktif dan kegiatan reproduktif. Kegiatan produktif dibagi menjadi ke dalam dua kegiatan lagi, yaitu kegiatan dalam pengelolaan hutan rakyat dan kegiatan di luar pengelolaan hutan rakyat.

Pengelolaan hutan rakyat di Desa Sabaleh melibatkan peran suami dan istri dimana masing-masing memiliki peran dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat.

Curahan waktu Kerja dalam Pengelolaan Hutan Rakyat

Peran laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan hutan rakyat dapat dilihat dari curahan waktu kerja. Curahan waktu kerja responden dihitung mulai dari melaksanakan suatu pekerjaan tertentu sampai pekerjaan itu selesai. Curahan waktu kerja responden dalam pengelolaan hutan rakyat dihitung dalam satuan HOK/tahun. Kegiatan perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan hutan rakyat dapat dilihat pada tabel 2 sampai dengan 5.

Tabel 2. Kegiatan Perencanaan dan Curahan Waktu Kerja Pengolaan Hutan Rakyat

No	Kegiatan	Jenis Kegiatan Pengelolaan Hutan Rakyat	Curahan Waktu Kerja (Jm/Thn)			Curahan Waktu Kerja (%)		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Perencanaan	Pembersihan Lahan	1613,60	1452,34	3065,94	28,16	25,35	53,52
		Pemilihan Tanaman	1498,53	1164,63	2663,16	26,16	20,33	46,48
	Total		3112,12	2616,97	5729,09	54,32	45,68	100,00

Tabel 3. Kegiatan Pelaksanaan dan Curahan waktu kerja Pengolaan Hutan Rakyat

No	Kegiatan	Jenis Kegiatan Pengelolaan Hutan Rakyat	Curahan Waktu Kerja (Jm/Thn)			Curahan Waktu Kerja (%)		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Perencanaan	Pembersihan Lahan	1613,60	1452,34	3065,94	28,16	25,35	53,52
		Pemilihan Tanaman	1498,53	1164,63	2663,16	26,16	20,33	46,48
	Total		3112,12	2616,97	5729,09	54,32	45,68	100,00

Tabel 4. Kegiatan Perencanaan dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Hutan Rakyat.

Kegiatan	Jenis Kegiatan Pengelolaan Hutan Rakyat	Pengambilan Keputusan			Pengambilan Keputusan (%)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Perencanaan	Pembersihan Lahan	1629,48	1452,32	3081,80	29,71	26,48	56,20
	Pemilihan Tanaman	1379,00	1023,00	2402,00	25,15	18,65	43,80
Total		3008,48	2475,32	5483,80	54,86	45,14	100,00

Tabel 5. Kegiatan Pelaksanaan Pengambilan Keputusan Pengelolaan Hutan Rakyat.

Kegiatan	Jenis Kegiatan Pengelolaan Hutan Rakyat	Pengambilan Keputusan			Pengambilan Keputusan (%)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pelaksanaan	Persiapan Lahan	2175,27	1611,64	3786,91	7,36	5,45	12,82
	Pembibitan	1348,62	913,23	2261,85	4,56	3,09	7,66
	Penanaman	1924,43	1455,39	3379,83	6,51	4,93	11,44
	Pemelirahaan	1345,50	916,00	2261,50	4,55	3,10	7,65
	Pemanenan	5055,16	4380,63	9435,79	17,11	14,83	31,94
	Pemasaran	4041	4378	8419	13,68	14,82	28,50
Total		15889.98	13654,89	29544,87	53,78	46,22	100,00

Jenis Tanaman yang berada Di Hutan Rakyat

Tanaman yang ditanam pada pola agroforestri ini yaitu tanaman penghasil kayu seperti Gamal (*Gliricidia sepium)* , Pulai (*Alstonia scolaris*), palem ekor ikan (*Roystonea regia*), binuang (*Octomeles sumatrana*), kenari (*Canarium ovatum*), Lantoro (*Leucaena leucocephala)*, Ganemo (*Gnetum* ganemon), Pala (*Myristica fragrans)*, Cengkeh (*Syzygium aromaticum*), Pohon bendo/benda (*Artocarpus*

elasticum), aren (*Arenga pinnata*), durian hutan (), woka (*Livistina*) dan pinang (*Areca catechu)*. Tanaman penghasil buah seperti, durian (*Durio zibethinus*), nangka (*Artocarpus heterophyllus*), alpukat (*Persea americana*), cempedak (*Integer*), manggis (*Garcinia mangostana*), mangga (*Mangifera indica*), pepaya (*Carica papaya*), kelapa (*Cocos nucifera*), langsa (*Lansium domesticum*), jambu biji (*Psidium guajava*), rambutan (*Nephelium lappaceum*) dan coklat (*Theobroma cacao*).
Serta tanaman pangan dan palawija seperti, Pisang (*Musa paradisiacal*), Jagung (*Zea mays*), Jeruk lemon cui (*Citrus microcarpa*), Padi gogo lading kering (*Oriza spp*), Kacang tanah (*Arachis hypogaea*), Cabe (*Capsicum frustescens L*), dan *Sayur*-sayuran.

KESIMPULAN

Peran perempuan pada pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan rakyat baik dalam perencanaan dan pelaksanaan penanaman lebih kecil dibandingkan responden laki-laki. Demikian juga dengan curahan waktu kerja responden perempuan lebih kecil dibandingkan laki-laki. Pengambilan keputusan pada kegiatan penanaman dalam program hutan rakyat oleh suami sebesar 53,78%, istri 46,22% dan perencanaan penanaman dalam program hutan rakyat oleh suami sebesar 54,86%, istri 45,14%. Curahan waktu kerja pada kegiatan penanaman oleh suami sebesar 52,01%, istri 47,99% serta curahan waktu kerja perencanaan suami 54,32%, istri 45,68%.

Saran

1. Pemerintah secepatnya mengeluarkan SK kelompok tani agar masyarakat sekitar lebih mengetahui tentang adanya kelompok tani di desa sabaleh dan sebaiknya di dalam lahan lebih banyak lagi membudidayakan tanaman kehutanan agar dalam pengelolaan hutan rakyat lebik baik lagi.
2. Pemerintah harus lebih memperhatikan akses jalan menuju ke masing-masing lahan petani di karena jarak yang di tempuh dari desa menuju lokasi sangatlah jauh dan kondisi jalan yang rusak.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Bappenas. (2009). Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral (Modul 7 Gap Analysis). Retrieved Juni 17, 2014, from www.goodgovermance-bappenas.go.id.
[2] Agarwal. B., 2009. *Gender and forest conservation: the impact of women's participation in community forest governance. Ecological Economics.*
[3] Sundawati L, D.R. Nurrochmat, L. Setyaningsih, H. Puspitawati, S. Trison.2008. Pemasaran Produk-produk Agroforestry. Kerjasama Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan World Agroforestry Center (ICRAF)
[4] Manik, K.E.S., 2003. Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penerbit Djambatan, Jakarta.
[5] Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Jakarta. Depdiknas.
[6] Basuki, A. T. dan Imamuddin Yuliadi. (2015). Ekonometrika Teori & Aplikasi. Yogyakarta: Mitra Pustaka Nurani
[7] Iqbal H,2004. Pokok-Pokok Materi Teori Pengambilan Keputusan. Penerbit Jakarta : Ghalis Indonesia.
[8]Amir, L.Y. 2020. Pengelolaan dan Pengembangan Agroforestri di Hutan Desa Qahabanga Kelurahan Tobololo Kota Ternate [Skripsi]. Fakultas Pertanian Universitas Khairun Ternate

ISSN 2722-9475 (Cetak)
ISSN 2722-9467 (Online)